

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pewartar perempuan di seluruh dunia dihadapkan dengan penyakit sosial sekaligus permasalahan utama gender yang sama ketika bekerja, yakni kekerasan dan pelecehan seksual. Sebuah studi oleh Demos (dalam Koirala, 2020, hlm.47-48) di Britania Raya menemukan bahwa “jurnalisme adalah salah satu kategori di mana perempuan menerima lebih banyak pelecehan, dengan menerima pelecehan kira-kira tiga kali lipat lebih banyak”.

Menurut Sada dkk. (2015, hlm.209), pelecehan seksual menjadi masalah yang tak terucapkan. Sentuhan yang tidak perlu, pengiriman email yang tidak diinginkan, pesan teks tidak sopan, tampilan gambar-gambar porno di tempat kerja, komentar seksual, dll., umumnya dianggap sebagai bentuk pelecehan seksual, yang dampaknya dapat memiliki efek melemahkan kepribadian, kehidupan kerja dan perilaku sosial dari orang yang dilecehkan.

Jelas bahwa pewarta perempuan di seluruh dunia menghadapi berbagai tantangan pelecehan fisik juga psikologis dalam profesi mereka. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Rajeev (2019, hlm.315) mengungkapkan bahwa sebagian besar pewarta perempuan menghadapi banyak pelecehan lisan di tempat kerja. Belum lagi dengan adanya tuntutan pengalihan kerja malam dan tugas lembur bagi pewarta perempuan profesional, sehingga mereka perlu bekerja dalam jadwal yang sangat rentan akan pelecehan seksual di lapangan.

Pada umumnya, pelecehan seksual timbul sebagai bentuk proses komunikasi yang berjalan tidak sempurna. Dalam proses komunikasi sendiri terjadi siklus natural komunikasi interpersonal, dimana di dalamnya terdapat unsur pesan, saluran komunikasi, umpan balik, dan gangguan komunikasi (DeVito, 2007, hlm.9). Pelecehan seksual bisa terjadi karena proses komunikasi yang tidak diinginkan, atau terjadi karena komunikasi yang melenceng dari isi pesan utama,

sehingga menimbulkan umpan balik yang tidak diinginkan, dan didukung oleh berbagai gangguan baik gangguan psikologis, semantik, konteks, ataupun etika.

Secara lebih rinci, pelecehan seksual ini mengacu pada kesalahan komunikasi gender yang dipengaruhi dua budaya yang berbeda. Maltz dan Borker (dalam Prakasa, 2015, hlm.21) lantas mengembangkan permasalahan ini ke dalam konsep *Two Culture* antara pria dan perempuan yang memiliki dua perbedaan gaya dan strategi dalam komunikasi, dimana keduanya sama-sama valid.

Maltz dan Borker menyebut solusi dalam mencari perbaikan untuk kesalahpahaman gender tersebut adalah saling pengertian dan saling menerima. Laki-laki dan perempuan harus memahami cara berhubungan satu dan lainnya dan menanggapi dengan tepat. Namun demikian, banyak pengalaman dan pengamatan disekitar kita yang menggambarkan rumitnya komunikasi yang terjadi di antara keduanya. Laki-laki dan perempuan sering menggunakan bahasa yang bertentangan/berlawanan dengan maksud dan tujuannya masing-masing, sehingga seringkali komunikasi di antara keduanya dapat bermakna pelecehan seksual sesuai pemahaman perempuan dalam memaknai komunikasi yang tercipta (Prakasa, 2015, hlm.20-21).

Menurut Prakasa (2015, hlm.20), adanya unsur-unsur kesengajaan dari para pria untuk mempertahankan dominasinya di masyarakat dengan membedakan ekspresi berkomunikasi untuk laki-laki dan perempuan. Hal ini disebabkan karena paradigma masyarakat terhadap perempuan yang dianggap hanya sebagai pelengkap, objek, dan lemah. Oleh karenanya, muncul ekspresi-ekspresi asimetri yang berimbas kepada ketidakadilan (*gender inequalities*) terhadap perempuan yang menjadikan perempuan sebagai objek seksual bagi laki-laki.

Pelecehan Seksual kemudian menjadi salah satu masalah yang mengikis kepercayaan diri perempuan dan menghilangkan identitas mereka sebagai peserta yang setara dalam sebuah organisasi (North, 2015, hlm.2). Ada beberapa kisah pelecehan seksual yang dirinci dalam otobiografi oleh pewarta perempuan dan artikel dari media arus utama tentang insiden individu, tetapi baru pada tahun 1996 survei serikat menyediakan bukti statistik dari masalah di seluruh industri. Survei Aliansi Media, Hiburan, dan Seni itu menemukan bahwa separuh lebih dari

jumlah 368 pewarta perempuan pernah mengalami pelecehan seksual di tempat kerja (North, 2015, hlm.1).

Koirala (2020, hlm.48) berpendapat jika pewarta seharusnya tidak perlu bekerja dalam ketakutan karena pekerjaan atau jenis kelamin mereka. Namun, resistensi terhadap perempuan di industri yang didominasi laki-laki seperti jurnalistik ini bukanlah fenomena baru. Media feminis dari seluruh dunia memiliki pengalaman panjang menyisihkan masalah keselamatan pewarta perempuan, khususnya masalah pelecehan di tempat kerja dan di depan umum.

Mulanya, permasalahan bagi pewarta perempuan adalah “*eve teasing*” atau lebih dikenal dengan pelecehan jalanan yang sering ditemui perempuan pada umumnya. Pewarta perempuan akan menemukan pelecehan seksual ketika mereka melakukan liputan lapangan. Di beberapa negara sub benua Asia seperti India, Pakistan, Bangladesh, dan Nepal menyebutkan istilah “*Eve-teasing*” adalah hal yang kronis, telah menjadi masalah yang memprihatinkan bagi kaum perempuan di negara tersebut. Ghosh (dalam Ahmed dkk., 2018, hlm.69-70) telah mengidentifikasi *eve-teasing* sebagai; “Sebuah sikap, pola pikir, seperangkat perilaku yang ditafsirkan sebagai penghinaan dan tindakan penghinaan. *Eve-teasing* adalah istilah khusus gender di mana perempuan digoda karena peringkat sosial yang lebih rendah bagi mereka.

Seiring berjalannya waktu, pelecehan seksual bukan lagi sekadar masalah di lapangan. Hal ini kemudian meresap ke dalam lingkungan kantor. Williams dkk. (dalam Ahmed dkk., 2018, hlm.77) telah menyebutkan dalam artikel mereka bahwa tindakan menggoda, mengolok-olok seksual dan ajakan kencan telah berkembang menjadi hal yang umum di tempat kerja. Menurut Ahmed, organisasi tidak akan pernah bisa lepas dari seksualitas karena manusia adalah makhluk seksual. Hal ini terutama akan semakin rentan dalam organisasi yang didominasi laki-laki.

North (2015, hlm.1) menyebutkan, pelecehan seksual tumbuh subur dalam budaya yang mengistimewakan hegemoni maskulinitas, dan mikrokosmos yang didominasi laki-laki dari media berita, sehingga menyediakan tempat untuk

berkembang biak yang subur bagi pelecehan sebagai bagian yang berurat berakar dari budaya kerja jurnalisme sejak perempuan mulai memasuki industri ini.

Ditambah lagi dengan maksud kehadiran perempuan dalam dunia jurnalistik yang hanya dijadikan lambang dalam strategi bisnis media untuk menarik khalayak yang lebih luas, baik laki-laki ataupun perempuan (Cvetkovic dan Oostman, 2018, hlm.92). Kurangnya keragaman historis gender dalam angkatan kerja dan pengaruhnya pada penetapan nilai-nilai, standar, dan norma-norma maskulin menyiratkan bahwa industri yang didominasi oleh laki-laki akan menghasilkan bias dan pengucilan terhadap partisipasi perempuan dan nilai-nilai potensial dari kasih sayang dan kepedulian yang mereka promosikan (Cvetkovic dan Oostman, 2018, hlm.95).

Argumen tersebut diperkuat oleh laporan Proyek Kebebasan dan Solidaritas Media Asia Selatan (SAMSAN) di Bangladesh TV, pewarta perempuan sering diperlakukan sebagai objek seks dan diharapkan untuk bertindak dan berpakaian dengan cara itu. Mereka jarang dipandang sebagai pewarta serius. Pelecehan seksual yang menyedihkan di tempat kerja meningkat. Ini sebagian besar disembunyikan dan tidak berdokumen dan pewarta perempuan yang mengajukan tuntutan pelecehan seksual terhadap kolega atau senior sering berisiko kehilangan pekerjaan mereka atau tuduhan mereka tidak dianggap serius dan diberhentikan sebagai tuduhan palsu (Safa dan Akter, 2015, hlm.209).

Dalam diskusi tentang gender dan perbedaan seksual, tubuh pewarta perempuan, daya tarik, dan seksualitas telah dikonseptualisasikan sebagai bagian dari praktik jurnalistik pelaporan dan penyajian berita. Seperti misalnya pada jurnalisme penyiaran, presenter perempuan harus mengatur dan mendisiplinkan tubuh mereka dengan terlihat rapi dan menarik (seperti memamerkan senyum genit, mengajukan pertanyaan pribadi, memeluk penjahat, sampai usaha mempertunjukkan lekuk tubuhnya yang indah), sedangkan rekan laki-laki terkesan lebih santai, tidak peduli usia ataupun berat badan dan daya tarik fisik (Cvetkovic dan Oostman, 2018, hlm.96).

Steiner (dalam Cvetkovic dan Oostman, 2018, hlm.96) juga berpendapat bahwa penampilan visual dan seksualitas telah menjadi konstituen dalam wacana

global kapitalisme di mana wartawan perempuan secara aktif berpartisipasi dalam peran menjual berita, baik kepada khalayak maupun pengiklan.

Menurut Koirala (2020, hlm.59), hirarki gender sempit menimbulkan masalah sulit bagi suara perempuan yang melampaui kesenjangan publik/swasta. Berbicara di depan umum kemudian dianggap menyimpang dari peran tradisional perempuan dan berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa perempuan yang tidak sesuai dengan peran gender tradisionalnya secara tidak proporsional ditargetkan untuk pelecehan (Megarry, 2014, hlm.49). Koirala berpendapat bahwa pelecehan berbasis gender dimaksudkan untuk memperkuat patriarki, di mana perempuan diharapkan menjadi korban yang tunduk. Dalam hal ini, konsep hegemoni maskulinitas telah digunakan dalam studi media feminis untuk menjelaskan kekuatan laki-laki atas perempuan.

Teori ini juga telah digunakan untuk menjelaskan alasan penggunaan kekerasan oleh laki-laki untuk melegitimasi hierarki gender tradisional (Koirala, 2020, hlm.49). Kaum feminis juga berpendapat bahwa pelecehan seksual (*online* atau *offline*) adalah hasil dari sistem gender patriarki yang mengakar dalam mendiskriminasi perempuan dan mendukung “bentuk normatif dominan maskulinitas” (Uggen dan Blackstone, 2004, hlm.66).

Namun demikian, besarnya angka pelecehan seksual terhadap pewarta perempuan nyatanya jarang menjadi sorotan publik. Ahmed dkk. (2018, hlm.77-78) dalam jurnalnya mencatat analisis eksplorasi yang dilakukan melalui survei acak terhadap pewarta Indiana. Penulis menggambarkan bahwa, “Peliputan media tentang pelecehan seksual dalam organisasi media, seperti peliputan kejadian buruk lainnya di dalam media, jarang terjadi.”.

Salah satu alasan utama mengapa media jarang berbicara tentang pelecehan seksual khususnya di lingkungan mereka adalah karena para editor lebih suka menghindari penerbitan berita pelecehan seksual seperti yang sering terjadi dalam organisasi mereka sendiri. Mereka juga mengungkapkan bahwa perempuan tidak pernah melaporkan kejadian seperti itu karena pelecehan kebanyakan bersifat verbal dan bukan merupakan suatu masalah yang tepat/ menarik untuk dibicarakan (Ahmed dkk., 2018, hlm.77-78).

Stellarosa dan Silaban (2018, hlm.284) menyebut perusahaan media di Indonesia juga kebanyakan belum memiliki kebijakan dan saluran khusus untuk pengaduan intimidasi dan pelecehan seksual di tempat kerja. Pengaduan tindakan pelecehan seksual biasanya cukup dengan melaporkan langsung pada atasan. Kondisi ini menjadi semakin sulit ketika pelaku pelecehan atau intimidasi adalah atasan sendiri, atau ketika pewarta perempuan mengalami pelecehan seksual di luar kantor ketika sedang peliputan. Akhirnya, setiap pewarta perempuan hanya memiliki jalan keluar untuk mundur dan meninggalkan pekerjaan mereka karena masalah ini atau tetap diam dan menerima segalanya.

Ahmed dkk. (2018, hlm.70) menjelaskan bahwa pelecehan seksual telah menjadi pengalaman yang sangat menakutkan dalam kehidupan perempuan dengan efek negatif yang serius pada psikologis dan fisik mereka. Hal itu tentunya menghambat kebebasan mereka dan membuat perempuan tidak bisa menikmati kesenangan hidup. Tekanan mental tidak hanya mempengaruhi para korban tetapi juga menjadi bayangan gelap yang mengelilingi seluruh keluarga. Ini tidak hanya merusak keluarga tetapi juga memiliki efek *intervallic* pada Pembangunan Sosial-budaya.

Sejalan dengan hal tersebut, Fairchild (dalam Ahmed dkk., 2018, hlm.70) menyebutkan, ‘banyak perempuan menemukan dan/atau mengalami pelecehan dari orang asing, mereka menjadi ketakutan, tidak senang, dan merasa terganggu; perempuan sering menggambarkan diri mereka frustrasi, jijik dan marah atas pengalaman tersebut. *Cat calling*, tatapan yang tidak sopan, siulan, dan bahkan menyentuh adalah pengalaman yang paling utama dan bagi sebagian perempuan itu merupakan pengalaman sehari-hari yang sangat nyata, umum, dan sering kali tidak menyenangkan.

Selain hambatan di tempat kerja dan di lapangan, kehadiran internet rupanya juga menjadi wadah baru yang semakin besar untuk permasalahan ini. Serangan pribadi via komentar *online*, surel yang mengancam, dan unggahan media sosial merupakan ancaman serius bagi partisipasi pewarta perempuan. Bahkan di negara-negara yang relatif aman bagi pewarta, permasalahan *online* tetap saja menjadi permasalahan bagi banyak pewarta perempuan (Koirala, 2020, hlm.47).

Saat sistem jurnalisme bergeser ke arah teknologi, rutinitas jurnalistik pun ikut bergeser. Misalnya, menggunakan media sosial dan menanggapi atau membaca komentar *online* telah dinormalisasi ke dalam rutinitas pewarta (Chen dkk., 2018, hlm.5).

Banyak pewarta perempuan melaporkan bahwa mereka harus terlibat dengan audiens secara *online*, yang merupakan tuntutan pekerjaan bagi mereka. Mereka sering menghadapi komentar seksis yang mengkritik, menyerang, meminggirkan, stereotip, atau mengancam mereka berdasarkan jenis kelamin atau seksualitas mereka. Seringkali, kritik terhadap karya mereka dibingkai sebagai serangan misoginis dan, kadang-kadang, bahkan melibatkan kekerasan seksual (Chen dkk., 2018, hlm.1).

Platform media sosial juga menjadi ruang untuk penyalahgunaan tanpa filter. Dalam survei yang dilakukan Pew Research Center di Amerika Serikat, 40 persen responden secara pribadi mengalami pelecehan *online* dan 73 persen melihat seseorang dilecehkan secara *online*. Penyalahgunaan *online* bervariasi menurut jenis kelamin, ras, dan seksualitas, di mana perempuan lebih memiliki potensi menjadi korban pelecehan seksual, pengintaian maya, dan pornografi dibandingkan laki-laki. Bentuk pelecehan gender ini seringkali bersifat kekerasan seksual. (Antunovic, 2018, hlm.4).

Chen dkk. (2018, hlm.3) menyebut pelecehan saat ini umum terjadi secara *online* sebagian karena efek disinhibisi *online*; yang menyatakan bahwa orang mungkin merasa berani jika bersuara bebas melalui *online*, karena mereka merasa anonim atau bahkan tidak terlihat, sebagaimana adanya lebih sulit untuk menghubungkan tindakan mereka dengan identitas mereka.

Mirip dengan cara pelecehan seksual di tempat kerja diperlakukan pada 1970-an, pelecehan *online* pun tidak dianggap serius di masa ini. Pelecehan *online* menempatkan tanggung jawab pada korban untuk menanggapi "troll" dan mengabaikan bahaya fisik dan emosional yang ditimbulkan pada mereka. Citron (dalam Antunovic, 2018: 4) berpendapat bahwa mengakui pelecehan dunia maya sebagai diskriminasi gender sangat penting untuk "mendidik masyarakat tentang bahaya gender, memastikan bahwa keluhan perempuan didengar, meyakinkan

para pelaku untuk menghentikan serangan *online* mereka, dan pada akhirnya dapat mengubah subkultur *online* dari kebencian terhadap kesetaraan”. Dengan demikian, para cendekiawan dan aktivis feminis mengadvokasi penerapan kerangka kerja hak-hak sipil untuk mengalahkan pelecehan *online*.

Menurut Koirala (2020, hlm.47), selama internet menjadi alat penting bagi pewarta untuk memperoleh dan menyebarkan informasi, maka internet juga menjadi masalah besar untuk para pewarta, khususnya pewarta perempuan. Pewarta akan dihadapkan dengan banyak komentar yang memperlakukan, *cyberstalking*, dan pelecehan verbal lainnya. Kaum feminis melihat kehadiran Internet dengan teori awal yang baik, mereka optimis bahwa potensi *platform* digital dapat melampaui diskriminasi gender dalam interaksi.

Para cendekiawan feminis mengonseptualisasikan internet sebagai ruang di mana suara-suara yang terpinggirkan dapat menantang narasi dominan (Antunovic, 2018, hlm.3). Namun, fakta lain menyebut hal ini tidak berpengaruh terhadap gangguan kriminalisasi atau pelecehan. Berbagai penelitian yang ditemukan Koirala bahkan menunjukkan bahwa pelecehan *online* memiliki efek yang lebih kuat pada pewarta perempuan daripada laki-laki.

Membandingkan interaksi langsung dengan rutinitas pewarta di era jurnalisme digital ini, internet juga menciptakan ruang baru di mana pewarta perempuan cenderung menghadapi pelecehan. Dengan adanya internet, banyak pewarta diharapkan lebih mudah untuk hadir dan berbicara langsung dengan publik melalui media sosial. Namun, interaksi *online* ternyata lebih banyak menimbulkan misogini (kebencian terhadap perempuan), baik berupa diskriminasi seksual, kekerasan, atau pelecehan seksual. (Koirala, 2020, hlm.48). Disebutkan juga bahwa pelecehan secara *online* semakin meningkat dengan munculnya media sosial seperti *Facebook*, *Instagram*, dan *Twitter*.

Tahun 2016, The Guardian mempelajari 70 juta komentar yang diposting di website mereka. Survei ini menunjukkan 8 dari 10 pewarta yang mendapatkan komentar *netizen* bernada kebencian adalah pewarta perempuan. Serangan kepada pewarta perempuan jelas tidak hanya tentang keselamatan mereka secara fisik sebagai manusia, tapi juga keragaman pers dan juga kebebasan

berekspresi. Pelecehan *online* kepada pewarta perempuan ini juga seringkali diikuti oleh bentuk diskriminasi lainnya seperti *rasisme, homophobia, xenophobia* (Hapsari, 2019).

Dalam North (2015, hlm.4-5) disebutkan efek dari pelecehan seksual pada pewarta perempuan telah didokumentasikan dengan baik dalam literatur internasional. Survei IWMF menemukan bahwa percabangan pelecehan seksual tersebut mencakup efek emosional dan/atau psikologis dengan banyak menyalahkan diri sendiri atas pelecehan yang terjadi (Barton dan Storm, 2014, hlm.27).

Laporan itu mengatakan bahwa beberapa responden: Mengubah perilaku mereka di sekitar orang lain, termasuk tidak melakukan kontak mata, tidak menghadiri fungsi sosial kerja (ketika pelecehan terjadi di tempat kerja) dan tidak menjalin pertemanan dengan siapa pun yang terkait dengan pekerjaan. Beberapa perempuan mengatakan mereka telah memodifikasi cara mereka berpakaian untuk bekerja, atau berusaha untuk menampilkan diri mereka sebagai pribadi yang konservatif (Barton dan Storm, 2014, hlm.27).

Kasus pelecehan seksual di Indonesia sendiri masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah Indonesia. Seperti yang diungkapkan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), I Gusti Bintang Darmawati, bahwa masih banyak kasus pelecehan/kekerasan seksual sebagaimana tercantum pada Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2019. Sepanjang tahun ini, ada 2.988 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan Indonesia yang dilaporkan. Angka ini adalah 31 persen dari total kasus kekerasan terhadap perempuan yang telah dilaporkan (Purnamasari, 2019).

Sebuah studi yang dilakukan oleh perusahaan riset yang berbasis di Singapura, *Value Champion*, menemukan bahwa Indonesia adalah negara paling berbahaya kedua bagi perempuan di kawasan Asia Pasifik. Dari 14 negara Asia Pasifik yang dianalisis, India, Indonesia dan Filipina dianggap sebagai negara yang paling tidak aman bagi perempuan (Inasis, 2019).

Data Komnas Perempuan mencatat sepanjang tahun 2019, terjadi 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan, meningkat 6 persen dari tahun sebelumnya. Mereka mengatakan, data kekerasan terhadap perempuan di Indonesia juga terus meningkat sebanyak 792 persen atau 8 kali lipat selama lebih dari satu dekade terakhir (Putri, 2020). Dan hal ini disebut terus meningkat terutama akibat perkembangan media digital (Siaran Pers Komnas Perempuan, 2020).

Komnas Perempuan mencatat ada 8 perempuan setiap harinya yang mengalami pemerkosaan. Dalam catatan Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) selama tiga tahun sebelumnya (2016-2018), 42 persen diantaranya terklasifikasi sebagai kasus kekerasan/pelecehan seksual terhadap perempuan. Forum Pengadu dan Layanan sebagai salah satu mitra Komnas Perempuan, menyebut, kekerasan terhadap perempuan di 32 provinsi seluruh Indonesia yang menjadi jangkauan mereka, kasus terbanyak adalah pelecehan seksual dengan angka 329 kasus (Nuroyono, 2019).

Untuk kasus pelecehan seksual di seluruh Indonesia dari 34 provinsi, Aceh menempati peringkat pertama, sedangkan Jawa timur di posisi kedua diikuti Jawa Barat di posisi ketiga, DKI Jakarta di posisi keempat dan Sumatera Selatan di posisi kelima (Afif, 2015).

Berdasarkan Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan, kekerasan di ranah publik mencapai angka 3.915 kasus (28 persen), di mana kekerasan seksual menempati peringkat pertama sebanyak 2.521 kasus (64 persen). Tiga jenis kekerasan yang paling banyak pada kekerasan seksual di ranah publik ini adalah pencabulan (1.136 kasus), pemerkosaan (762 kasus), dan pelecehan seksual (394 kasus) (Komnas Perempuan, 2019).

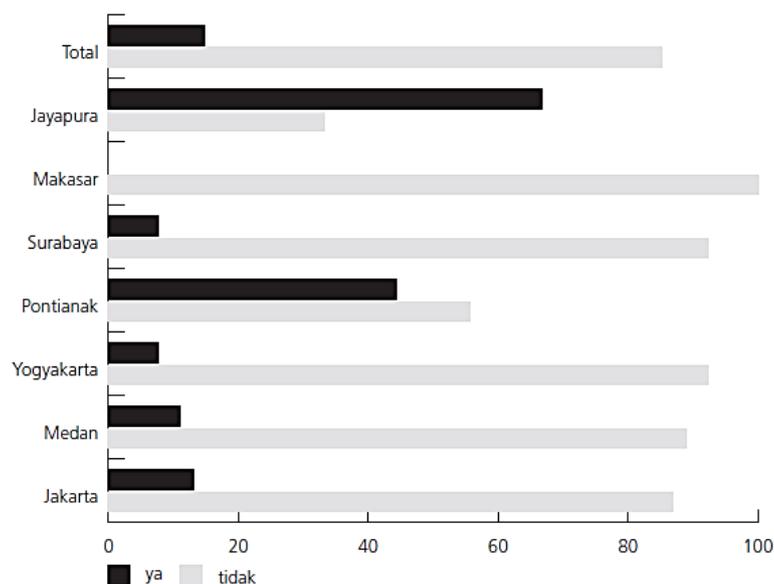
Ranah publik sendiri berarti kondisi di mana pelaku dan korban tidak memiliki hubungan kekerabatan, darah ataupun perkawinan. Bisa jadi pelakunya adalah atasan, tetangga, rekan kerja, tokoh masyarakat, ataupun orang yang tidak dikenal (Komnas Perempuan, 2019).

Dalam hal ini jelas bahwa pewarta perempuan di negara Indonesia, sebagai profesi yang paling sering menarik perempuan ke ranah publik, merupakan salah

satu kelompok yang sangat rentan mengalami pelecehan seksual. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ini, Indonesia mencatat sejumlah kasus pelecehan seksual terhadap pewarta perempuan yang mencuat ke permukaan, dan ini terjadi di sejumlah daerah.

Tiga kasus pelecehan terhadap pewarta perempuan menonjol pertama kali di tahun 2013 yakni terjadi di Jakarta, Ngawi (Jawa Timur), dan Medan (Sumatera Utara). Pertama, kasus kekerasan seksual terhadap empat perempuan di kantor berita Antara, Jakarta. Kedua, kasus pelecehan seksual yang terjadi pada seorang perempuan reporter magang di Radar Ngawi. Ketiga, kasus pelecehan seksual yang terjadi terhadap seorang reporter di Medan. Dua kasus yang disebut lebih dulu itu dilakukan oleh atasan korban, sedangkan kasus di Medan dilakukan aparat keamanan. Atas kejadian tersebut seluruh korban mengalami trauma mendalam (Duillah, 2018).

Selanjutnya, penelitian AJI mengenai kekerasan seksual yang dialami para pekerja media massa, pada 2011. AJI melakukan penelitian di tujuh kota besar di Indonesia, dan melibatkan 135 responden pewarta perempuan. Hasilnya menunjukkan sebanyak 14,81 persen mengalami pelecehan seksual dan kekerasan ketika bertugas, dengan daerah konflik sebagai tempat paling tinggi atas kasus pelecehan ini.



Grafik 4.6 Pelecehan Seksual Dalam Tugas

Gambar 1. 1 Grafik Pelecehan Seksual Dalam Tugas Pewarta Perempuan Di Indonesia Pada 2011. Sumber : Luviana, 2012, hlm.112.

Pontianak dan Jayapura mengalami pelecehan cukup besar masing-masing 44,44 persen dan 66,67 persen. Bahkan di Jayapura, dengan jumlah sebesar itu berarti lebih dari separuh pewarta perempuannya mengalami pelecehan seksual. Di Jayapura, seorang pewarta perempuan masih mengalami pelecehan dari narasumber ketika mereka melakukan peliputan di lapangan. Tak jarang narasumber yang melecehkan mereka maupun mengajak berkencan. Pewarta perempuan di Jayapura juga lebih rawan dalam menjalankan tugasnya karena mereka berada seringkali bekerja di daerah yang sedang berkonflik (Luviana, 2012, hlm.112).

Data terakhir yang muncul berasal dari media *Asian Correspondent* pada 15 Januari 2018 dalam artikel berjudul “*Female journalists, male politicians and the epidemic of sexual harassment in Asean*”, mengungkap laporan dua pewarta perempuan Malaysia dan seorang pewarta perempuan Indonesia.

Ketiganya berbagi pengalaman serupa tentang terjadinya pelecehan seksual saat menjalankan profesinya sebagai pewarta. Tindakan pelecehan itu dilakukan melalui pesan teks, kontak fisik, hingga undangan makan malam ‘khusus’. Hal yang disesalkan adalah fakta bahwa ketika pewarta perempuan melapor pada editornya, ia justru diminta untuk ‘memanfaatkan’ situasi itu untuk mendapatkan berita yang lebih eksklusif (Duillah, 2018).

Kasus-kasus seperti ini telah lama diabaikan karena dianggap tidak penting, bahkan dianggap hal yang ‘normal’ sebagai bagian dari interaksi sehari-hari antara pewarta dan sumber berita mereka. Pelecehan seksual terhadap perempuan, khususnya pewarta perempuan masih menjadi fenomena gunung es. Artinya, dalam kondisi yang sebenarnya, perempuan di Indonesia mengalami kehidupan yang tak aman. Apabila setiap tahun kecenderungan pelecehan terhadap perempuan terus konsisten meningkat, maka hal tersebut menunjukkan tidak adanya perlindungan terhadap perempuan (Purnamasari, 2020).

Menurut Koordinator Divisi Perempuan AJI Jakarta, selama ini korban pelecehan dan kekerasan seksual di perusahaan media belum mendapatkan keadilan atas kasus yang menimpa mereka. Mereka juga mendapatkan tekanan dan kerap kesulitan untuk mencari lembaga yang bisa menampung dan mendampingi penyelesaian kasus mereka. Sehingga hanya memiliki pilihan untuk bungkam atau mundur dari pekerjaan (Ariefana, 2016).

Pentingnya mengungkap dan memperjuangkan kemerdekaan atas kasus tindak pelecehan seksual, khususnya terhadap pewarta perempuan, akhirnya menjadi landasan peneliti untuk melakukan penelitian pengalaman pewarta perempuan dalam menghadapi pelecehan seksual. Di samping itu, penelitian mengenai pengalaman pelecehan seksual seperti di Indonesia masih sangat minim, terutama terhadap pewarta perempuan. Apalagi, pemaknaan pelecehan seksual di lingkungan kerja jurnalistik masih dalam jangkauan sempit sehingga banyak bentuk pelecehan yang tidak dipermasalahkan oleh pihak media.

Dengan memahami lebih jauh mengenai pengalaman pelecehan seksual itu sendiri, peneliti diharapkan dapat menemukan solusi yang tepat untuk menghapus berkembangnya tindak pelecehan seksual dalam jurnalisme dan meningkatkan kesadaran pewarta perempuan akan arti penting harga diri mereka, serta pilihan yang harus mereka ambil karena diam justru hanya akan memberi kesempatan pada pelaku untuk terus berkeliaran dan mencari korban berikutnya.

Penelitian ini dilakukan terhadap pewarta perempuan yang tersebar di wilayah Indonesia, khususnya mereka yang tinggal di wilayah dengan data pelecehan seksual yang tinggi, serta daerah-daerah yang telah mengangkat kasus pelecehan seksual terhadap pewarta ke permukaan. Hal ini tentunya karena sejumlah alasan.

Penelitian ini dilakukan pada pewarta perempuan yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia untuk melihat perbedaan atau persamaan sudut pandang pemahaman dan pengalaman pelecehan seksual yang dihadapi oleh masing-masing informan di tempat dengan kondisi sosio-kultural yang tentunya juga berbeda. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberi jawaban mengapa kasus pelecehan seksual dalam jurnalistik ini jarang menjadi sorotan, khususnya setelah

AJI Indonesia bersama Dewan Pers dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan akan membentuk Posko Pengaduan Kasus Kekerasan Seksual untuk Pekerja Media. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dengan metode studi fenomenologi.

Teori yang akan digunakan sebagai dasar penelitian ini adalah *Muted Group Theory*. Teori yang berfokus pada bagaimana anggota kelompok yang termarginalkan dibungkam dan dianggap sebagai penutur yang pasif (Stellarosan dan Silaban, 2018, hlm.287). Perempuan dalam jurnalistik sendiri memang telah lama dijadikan sebagai kelompok pasif yang dikucilkan dalam partisipasi kegiatan jurnalistik karena bias yang timbul dari kurangnya keragaman historis gender dalam angkatan kerja dan pengaruhnya pada penetapan nilai-nilai, standar, dan norma-norma maskulin menyiratkan bahwa industri yang didominasi oleh laki-laki (Cvetkovic dan Oostman, 2018, hlm.95).

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk membahasnya dalam penelitian berjudul **“Pengalaman pewarta perempuan dalam menghadapi pelecehan seksual” (Studi Fenomenologi Terhadap Pewarta Perempuan Di Indonesia)**. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai bagaimana pewarta perempuan di Indonesia diperlakukan, khususnya pada pewarta perempuan yang bekerja di berbagai wilayah dengan angka pelecehan seksual yang tinggi, serta di wilayah yang memiliki data atas kasus pelecehan seksual terhadap jurnalis. Apa saja bentuk pelecehan yang selama ini mereka hadapi, serta berusaha menentukan apakah kasus pelecehan terhadap pewarta perempuan bersifat pribadi atau profesional. Selain itu, penelitian ini berfokus pada bagaimana insiden ini berdampak pada pengalaman kerja mereka.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah ditemukan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini ialah mengenai :

1. Bagaimana pewarta perempuan memaknai pelecehan seksual yang terjadi di lingkup pekerjaannya?
2. Bagaimana pengalaman pelecehan seksual dalam profesi yang kerap kali dihadapi pewarta perempuan di berbagai wilayah di Indonesia?
3. Bagaimana strategi komunikasi profesional yang dilakukan pewarta perempuan saat menghadapi pelecehan seksual dalam pekerjaannya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui makna pelecehan seksual dalam tugas jurnalistik bagi pewarta perempuan.
2. Untuk mengetahui pengalaman pelecehan seksual yang dihadapi pewarta perempuan di berbagai wilayah di Indonesia.
3. Untuk mengetahui strategi komunikasi profesional yang dilakukan pewarta perempuan saat menghadapi pelecehan seksual dalam pekerjaannya.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat/Signifikansi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif mengenai kajian komunikasi feminisme mengenai pewarta perempuan dan pengalaman kerja mereka khususnya dalam menghadapi pelecehan seksual, baik di lapangan, lingkungan kantor, ataupun secara *online*. Terlebih juga penelitian ini diharapkan dapat membantu memahami pengalaman pewarta perempuan dalam menghadapi berbagai pelecehan seksual dalam profesinya, serta pemaknaan yang didapat pewarta perempuan terhadap pelecehan seksual dalam tugas jurnalistik.

2. Manfaat/Signifikansi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pewarta perempuan, khususnya, serta seluruh bagian dari media, umumnya, guna menjunjung tinggi kesetaraan gender dalam profesi. Selain itu penelitian ini juga dapat digunakan sebagai sarana prasarana dalam menangani kasus gender paling umum di ranah jurnalistik, yaitu pelecehan seksual. Hal ini sangat penting guna mengembangkan tokoh perempuan, sehingga dapat berkembang dan terus berkarya.

3. Manfaat/Signifikansi Aksi Sosial

Penelitian ini diharapkan memberikan pencerahan kepada pewarta perempuan dengan menggunakan peran feminis yang kuat dalam kegiatan kerja serta komunikasi yang terjalin. Membuat pewarta perempuan paham arti penting gender “perempuan” dan betapa berharganya diri mereka, sehingga sadar akan arti penghargaan diri, baik oleh diri sendiri maupun orang lain. Dengan menggunakan pendekatan tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan dan keberanian dalam menghadapi serta melawan berbagai jenis pelecehan seksual yang ada.